



JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

ADAKAH HUBUNGAN ANTARA HARGA, PROMOSI, DENGAN LOYALITAS KONSUMEN ?

Fanny Callista

Lina Salim

63 - 72

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM,
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL**

Sriyono

Muhammad Junaidi

73 - 82

BOOK TAX GAP SEBAGAI ALAT MENDETEKSI MANAJEMEN LABA

Imam Setijawan

83 - 94

**ANALISIS PENGARUH STRESS, REWARD,
DAN REKAN SEJAWAT TERHADAP KINERJA AUDITOR INDEPENDEN**

Desi Yuresta

Taufikur Rahman

95 - 102

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARI'AH
DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL**

Diah Tri Susantie

Akhmad Sakhowi

Mahirun

103 - 113

**ANALISIS POTENSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK AIR TANAH KABUPATEN PEKALONGAN**

Choliq Sabana

Akhmad Samsul Ulum

114 - 126

J E B I	Volume 09	Nomor 02	Halaman : 063 - 126	September 2011	ISSN : 1693 - 0908
---------	-----------	----------	---------------------	----------------	--------------------

Diterbitkan Oleh :
**LEMBAGA PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PEKALONGAN**

JURNAL EKONOMI & BISNIS ISSN : 1693-0908

J E B I

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

EDITOR IN CHIEF

Dwi Susilo – Universitas Pekalongan

EDITORIAL BOARD

Akhmad Samsul Ulum – Universitas Pekalongan

Arum Ardianingsih – Universitas Pekalongan

Siti Yunitarini – Universitas Pekalongan

EDITORIAL ADVISORY AND REVIEW BOARD

Siti Nurhayati

Universitas Pekalongan

Imam Ghozali

Universitas Diponegoro

Agus Suroso

Universitas Jendral Soedirman

Hardo Basuki

Universitas Gadjah Mada

Chalimah

Universitas Pekalongan

Sulastri

Universitas Sriwijaya

M. Irhas Effendi

UPN "Veteran" Yogyakarta

Lelo Sintani

Universitas Palangkaraya

PUBLISHER

Lembaga Pengembangan Manajemen dan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan

EDITORIAL ADDRESS

Faculty of Economics Universitas Pekalongan

Jalan Sriwijaya No. 3 Pekalongan

Telepon (0285) 426800, 421464 ext. 107 Fax (0285) 421096

<http://www.unikal.ac.id> e-mail: jebiunikal@gmail.com

Economics and Business Journal (JEBI) has been published since 2002. It is published two times each year in March and September and intended to be a medium for publishing scientific papers in form of scientific study (literature/conceptual) and results of research in the fields of Accounting, Management, and Business. Each paper sent to JEBI will be reviewed by the Editorial Advisory and Review Board according to its area.

DAFTAR ISI

ADAKAH HUBUNGAN ANTARA HARGA, PROMOSI, DENGAN LOYALITAS KONSUMEN ?

Fanny Callista

Lina Salim

63 - 72

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL**

Sriyono

Muhammad Junaidi

73 - 82

BOOK TAX GAP SEBAGAI ALAT MENDETEKSI MANAJEMEN LABA

Imam Setijawan

83 - 94

**ANALISIS PENGARUH *STRESS*, *REWARD*, DAN REKAN SEJAWAT TERHADAP KINERJA
AUDITOR INDEPENDEN**

Desi Yuresta

Taufikur Rahman

95 - 102

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYA'RIAH DENGAN
PERBANKAN KONVENSIONAL**

Diah Tri Susantie

Akhmad Sakhowi

Mahirun

103 - 113

**ANALISIS POTENSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
DAN PAJAK AIR TANAH KABUPATEN PEKALONGAN**

Choliq Sabana

Akhmad Samsul Ulum

114 - 126

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL

Sriyono

Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta
e-mail: sriyono_upnvy@yahoo.com

Muhammad Junaidi

Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta
e-mail: mjuned@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Economic Growth (GDP), the General Allocation Fund (DAU), and revenue (PAD) on Capital Expenditures, with samples of the whole province of Indonesia in 2006-2008. Data sourced from the Provincial budget realization report throughout Indonesia in the form of reports on the realization of DAU, PAD and Capital Expenditures, as well as data of Gross Regional Domestic Product (GDP) at constant prices. From the results showed that the Economic Growth, DAU, and PAD either simultaneously or partially significant effect on Capital Expenditures. Economic growth (GDP) and PAD have predictive power on better than Capital Expenditures DAU. These results require information through subsequent studies

Keywords: *Economic Growth (GDP), The General Allocation Fund (DAU), Revenue (PAD), Capital Expenditures.*

PENDAHULUAN

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan ini berlaku di Indonesia berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). Diberlakukannya UU ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi yang dimiliki dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan prioritas & Plafon

Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD dan prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD dan prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai

Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan *output* pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key, 1940). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya anggaran belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas

pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik, hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan publik.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut: pertama, apakah Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), DAU, dan PAD berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal. Kedua, apakah Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), DAU, dan PAD berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal?

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Anggaran Daerah Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting karena di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah, yang terdiri dari perencanaan *input* dan *output* dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Proses pembuatan keputusan pengalokasian belanja modal menjadi sangat dinamis karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993). Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan, yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuel, 2000). Sedangkan menurut Von Hagen (2005) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua

tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Perubahan paradigma baru dalam pengelolaan dan penganggaran daerah merupakan hal yang tak dapat dipisahkan sebagai akibat penerapan otonomi daerah di Indonesia. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.

Pembahasan anggaran dilakukan eksekutif dan legislatif dengan membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* dengan mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran, sebelum anggaran ditetapkan menjadi suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan menjadi acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam pertanggungjawaban kepala daerah.

Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Pengalokasian sumberdaya ke dalam belanja modal (*capital expenditure*) merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, anggaran belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

Sesuai aturan APBD dan tujuan otonomi daerah, bahwa hakekat Anggaran Daerah adalah merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus benar-benar menggambarkan perangkaan ekonomis yang mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional adalah anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam merencanakan pemerintahan. Pengeluaran yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin.

2. Anggaran Modal/Investasi

Anggaran modal/investasi adalah anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja Modal atau investasi adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Lain lagi definisi APBD menurut 105 Tahun 2000, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

APBD adalah suatu anggaran daerah, definisi diatas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah termasuk APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta urainnya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas minimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yaitu biasanya satu tahun.

Pengembangan Hipotesis

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potesni fiskal pemerintah daerah satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999). Hasil penelitian yang dilakukan Oates (1995), Lin dan Liu (2000) menunjukkan desentralisasi fiskal memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan. Hasil ini mendukung penelitian Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004 yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Daerah ayat 1 berbunyi "Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan". Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa "Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem

jaminan sosial". Hasil penelitian diatas mendukung penelitian yang dilakukan Musyafaah (2007) yang memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Saragih, 2003). Tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah (Saragih, 2003) sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat. Bantuan pusat ini biasa disebut dengan DAU.

Pada penelitian Solikin (2007) memberikan hasil bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja modal. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Musyafaah (2007) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan. Holtz-Eakin et al (1995) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Kemudian Gamkhar dan oates (1996) juga menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal.

Hubungan positif yang kuat antara DAU dengan belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik -yang direalisasikan melalui belanja modal- juga ikut dibiayai oleh DAU tersebut. Bahkan Abdullah dan Halim (2006) menyatakan bahwa pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama dalam APBD. Sayangnya kontribusi DAU terhadap belanja modal masih belum efektif sehingga masih banyak daerah yang belum merata pembangunannya, juga masih kurangnya

pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum efektif (masih banyaknya masyarakat dibawah garis kemiskinan, belum meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sektor usaha kecil masih terabaikan- contoh PKL).

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002). Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan layanan publik yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Pada penelitian Solikin (2007) memberikan hasil bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Musyafaah (2007) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Selain itu, temuan tersebut juga

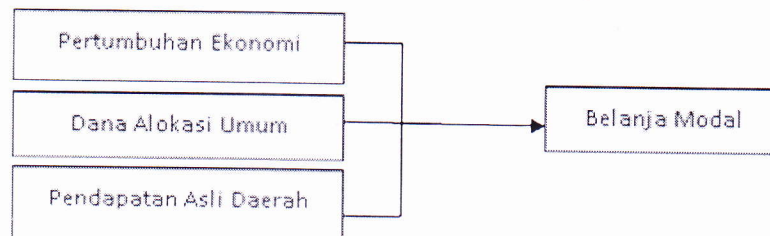
mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika Pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

H3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

H4: Pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dari 4 hipotesis di atas, maka dapat dibuat model penelitian sebagai berikut:

Gambar 1
Model Penelitian



Sampel dan Data Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah seluruh Indonesia baik kabupaten dan kota dari tahun 2006 – 2008. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel dan definisi operasional sebagai berikut: Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. DAU adalah

transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

Di mana:

- Y = Belanja Modal (BM)
- a = Konstanta
- b = Slope atau Koefisien Regresi
- X1 = Pertumbuhan Ekonomi
- X2 = Dana Alokasi Umum
- X3 = Pendapatan Asli Daerah
- e = error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled data*). Hasil model analisis data ini telah lolos telah melewati uji asumsi klasik standar yang sudah umum dilakukan dalam pemodelan ekonomi. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan adalah uji normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastis, autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat dalam appendix tulisan ini.

Pengujian hipotesis menggunakan data panel bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan menjadi pengujian secara parsial dan simultan.

Uji Statistik F

Hasil pengujian H4 antara Pertumbuhan Ekonomi, DAU dan PAD terhadap Belanja Modal yang dilakukan dengan uji statistik F dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.021	3	.007	30.965	.000 ^a
Residual	.022	94	.000		
Total	.043	97			

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, PE

b. Dependent Variable: BM

Berdasarkan hasil pengujian H4 yang telah dilakukan dengan uji F antara Pertumbuhan Ekonomi, DAU dan PAD terhadap Belanja Modal pada Tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi (P-value) = 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi,

DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dilihat besar pengaruhnya antara Pertumbuhan Ekonomi, DAU dan PAD secara simultan terhadap Belanja Modal ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar, hal ini dibuktikan dengan hasil uji koefisien determinasi (R²) yang dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.705 ^a	.497	.481	.0151383

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU, PE

Sumber: data sekunder diolah

Hasil pengujian dengan uji koefisien determinasi (R^2) pada Tabel 2, diperoleh besarnya nilai adjusted R^2 (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) dalam model regresi sebesar 0,481 yang berarti model dapat menjelaskan Belanja Modal sebesar 48,10%, sedangkan sisanya sebesar 51,90% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

Analisis Regresi Berganda dan Uji Statistik t

Hasil pengujian H1 sampai dengan H3 antara Pertumbuhan Ekonomi, DAU dan PAD terhadap Belanja Modal yang dilakukan dengan uji statistik t dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.332	.144		2.301	.024
PE	.329	.071	.367	4.657	.000
DAU	.305	.147	.154	2.074	.041
PAD	.319	.057	.438	5.603	.000

a. Dependent Variable: BM

Sumber: data sekunder diolah

Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut :

$$B M = 0,332 + 0,329PE + 0,305DAU + 0,319PAD + e$$

Adapun interpretasi dari persamaan diatas adalah :

- 1) Nilai konstanta sebesar 0,332 artinya apabila nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), DAU, PAD bernilai nol atau tidak ada penambahan, maka Belanja Modal yang terbentuk sebesar 0,332.
- 2) Koefisien regresi X_1 sebesar 0,329 menyatakan bahwa apabila setiap variabel Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar satu satuan, maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,329.
- 3) Koefisien regresi X_2 sebesar 0,305 menyatakan bahwa apabila setiap variabel DAU meningkat sebesar satu satuan, maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,305.
- 4) Koefisien regresi X_3 sebesar 0,319 menyatakan bahwa apabila setiap variabel PAD meningkat sebesar satu satuan, maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,319.

Hasil pengujian H1 yang telah dilakukan secara parsial (uji t) pada Tabel 3 antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal menunjukkan tingkat signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dilihat arah hubungannya, menunjukkan adanya hubungan positif antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal, bahwa jika Pertumbuhan Ekonomi meningkat maka Belanja Modal akan meningkat. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara besarnya Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian H2 yang telah dilakukan secara parsial (uji t) pada Tabel 3 antara DAU dengan Belanja Modal menunjukkan tingkat signifikansi uji t sebesar 0,041 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dilihat arah hubungannya, menunjukkan adanya hubungan positif antara DAU terhadap Belanja Modal, bahwa jika DAU meningkat maka Belanja Modal akan meningkat. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara besarnya sumbangan DAU terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian H3 yang telah dilakukan secara parsial (uji t) pada Tabel 3 antara PAD terhadap Belanja Modal tingkat signifikansi uji t sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dilihat arah hubungannya, menunjukkan adanya hubungan positif antara PAD terhadap Belanja Modal, bahwa jika PAD meningkat maka Belanja Modal akan meningkat. Ini berarti terdapat keterkaitan yang erat antara besarnya sumbangan PAD terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN

1. Secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal, sehingga hipotesis 4 dalam penelitian ini didukung oleh hasil penelitian.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi, DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 1, 2, dan 3 yang diajukan.
3. Model penelitian dapat menjelaskan pengaruh variabel independen (DAU, PAD, dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel dependen (Belanja Modal) sebesar 48,10%, sedangkan sisanya sebesar 51,90% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hadi. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 9, Universitas Kristen Wacana, Salatiga. 2006.
- _____. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita*. Simposium Nasional Akuntansi 10, Fakultas Ekonomi Universitas Satya Wacana Salatiga. 2007.
- Allen, Richard dan Tommasi, Daniel. *Managing a Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. OECD Paris. 2001.
- Blackley, P. Causality between revenues and expenditures and the size of federal budget. *Public Finance Quarterly* 14: 139-156. 1986.
- Boediono. *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4*. BPFE. Yogyakarta. 1985.
- _____. *Teori Pertumbuhan Ekonomi Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta. 1999.
- Gamkhar, Shama & Wallace Oates. *Asymetries in response to increase And discrease in intergovernmental grants: Some empirical findings*. *National Tax Journal* 49 (4): 501-512. 1996.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2005.
- Gujarati. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan Cetakan Keenam. Erlangga. Jakarta. 1999.
- Halim, Abdul. *Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Disertasi S3*. Tidak Dipublikasikan. Msi – FE UGM. 2001.
- _____. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK STIE YO. Yogyakarta. Hal : 127-146. 2001.
- _____. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2002.
- _____. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta. 2004.
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S, & Schuyley Tilly. *Intertempora Analysis of State An Local Government Spending: Theory and Tests*. *Journal of Urban Economics* 35: 159-174. 1994.
- Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta. 2004.
- Keefer, Philip and Khemani, Democracy, Public Expenditures, and the poor. *Work Bank Policy research Working Paper 3164*. 2003.
- Key, V.O. 1940. The lack of budgetary theory. *American Polotical Science Review* 34 (December), dalam Shafritz, Jay M. & Albert C. Hyde. 1997. *Classics of Public Administration*. Fourth edition. Fort Worth: Harcourt Brace College Publisher.
- Koncoro, Mudrajad. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga. Yogyakarta. 2004.

- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, Economic Development and Cultural Change Chicago*. Vol49. Hal : 1-21.
- Maimunah, Mutiara, *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra*. SNA IX, Padang 23-26 Agustus 2006.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2002.
- Musyafaah, Siti. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kab/Kota di Sumatra, Jawa dan Bali*. Skripsi, Universitas Sultan Agung. Semarang. 2007.
- Nugroho, Bhuono, Agung. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Edisi I. Andi. Yogyakarta. 2005.
- Oates, Wallace E. Comment on "Conflict And Dilemmas of Decentralization" by Rudolf Helmas. *The World Bank Research Observer*. 1995.
- PDRB *Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut lapangan usaha 2004-2008*. BPS Yogyakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang. *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY*. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-108. 2004.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____ No. 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____ No. 56 Tahun 2005. *Tentang Sistem Informasi Keuangan Dearah*.
- _____ No. 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undangundang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____ *Undangundang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____ *Undang-Undang No 32 Tahun 2004*. Tentang Pemerintah Daerah.
- _____ *Undang-Undang No 33 Tahun 2004*. Tentang Pemerintah Daerah.
- Rubin, Irene S. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. Second edition. Chatam, NJ: Chatam House Publishers, Inc. 1993.
- Sammuel, David. Fiscal horizontal accountability? Toward theory of budgetary "checks and balances" in presidential systems. University of Minnesota, *Working paper presented at the Coference on Horisontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May*. 2000.
- Saragih, Juli Panglima. *desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. 2003.
- Sekaran, Uma. *Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*. Second Edition. John Wiley & Sons. New York. 1992.
- Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. Principals and agents: An explanatory model of public Budgeting. *Jurnal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management (Fall)*. 1998.
- Statistik Keuangan Pemerintah Daerah provinsi Tahun 2005-2008*. BPS Yogyakarta.
- Subyantoro, Arief dan Sulistiyono Bambang. *Statistika II*. UPN "Veteran" Yogyakarta. 1998.
- Sukry, Abdullah & Halim, Abdul. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Darah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. SNA-VI. Surabaya. 2003.
- Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit ANDI. Yogyakarta, 2002.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Ekonomitrika Pengantar*. BPFE. Yogyakarta. 1993.
- Supomo, Bambang dan Indriantoro, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Penerbit BPFE. Yogyakarta, 2002.

Von Hagen, Jurgen. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social review*. 2002.

_____. Political Economy of fiscal Institutions, *Discussion paper 149, Governance and efficiency of Economic system, GESY*. 2005.

Wahyuningrum, Santi. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja*

Pembangunan, dan PAD (studi pada NTT, NTB, Maluku, Papua). Skripsi, UPN "V" Yogyakarta. 2007.

Wong, Jhon D. The fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity, *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 16.3. Hal 413-423. 2004..